

**PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PDRB  
SUBSEKTOR PERKEBUNAN DI PULAU SUMATERA**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**WIDYA ANISA RAHMADANI**

**208220020**



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/25

Access From ([repository.uma.ac.id](https://repository.uma.ac.id))8/2/25

# **PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PDRB SUBSEKTOR PERKEBUNAN DI PULAU SUMATERA**

## **SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh*

*Gelar Sarjana di Program Studi Agribisnis*

*Fakultas Pertanian Universitas Medan Area*



**OLEH**

**WIDYA ANISA RAHMADANI**

**208220020**

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/2/25

Access From ([repository.uma.ac.id](https://repository.uma.ac.id))8/2/25

Judul Skripsi :Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap PDRB  
Subsektor Perkebunan Di Pulau Sumatera  
Nama : Widya Anisa Rahmadani  
NPM : 208220020  
Fakultas : Pertanian

Disetujui oleh :

Komisi Pembimbing



Siti Sabrina Salqaura, SP, M.Sc  
Pembimbing

Diketahui Oleh:



Dr. Siswa Panjang Hernosa.SP., M.Si  
Dekan Fakultas Pertanian



Marizha Nurcahvani, S.ST,M.Sc  
Ketua Program Studi Agribisnis

Tanggal Lulus : 27 Agustus 2024

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelas akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 27 Agustus 2024

  
Widya Anisa Rahmadani  
208220020

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

---

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widya Anisa Rahmadani

Npm : 208220020

Program Studi : Agribisnis

Fakultas : Pertanian

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap PDRB Subsektor Perkebunan Di Pulau Sumatera", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Medan

Pada Tanggal : 27 Agustus 2024

Yang menyatakan

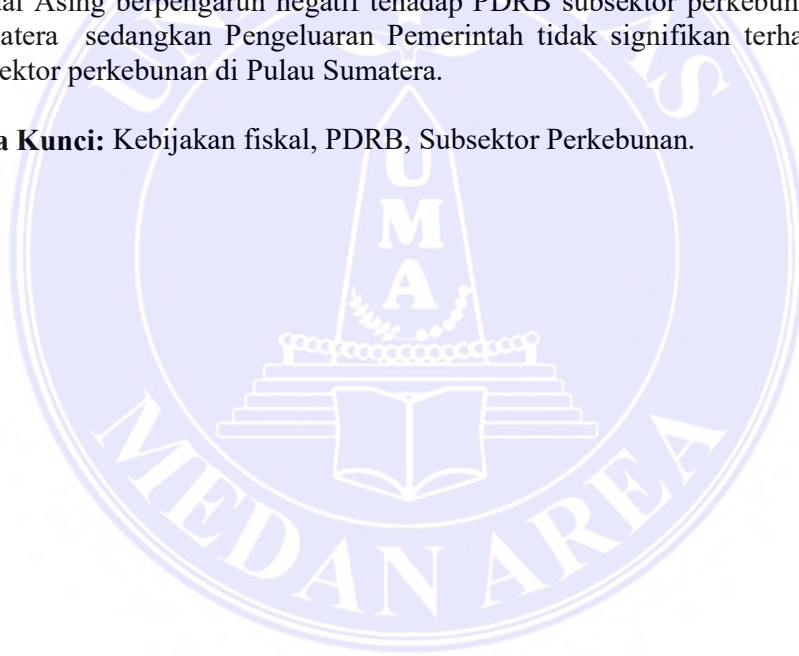


Widya Anisa Rahmadani

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan fiskal terhadap PDRB subsektor perkebunan di Pulau Sumatera. Analisis data menggunakan microsoft excel dan *Eviews 12*. Data yang digunakan berupa data panel dengan *cross section* 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera dan *time series* 5 tahun (2018-2022). Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui subsektor perkebunan di Pulau Sumatera tahun 2018-2022 yang menunjukkan bahwa subsektor perkebunan mengalami kenaikan setiap tahunnya terutama pada provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian, model yang baik adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Faktor-faktor yang berpengaruh nyata dan positif terhadap PDRB subsektor perkebunan di Pulau Sumatera adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Serapan Tenaga Kerja. Penanaman Modal Asing berpengaruh negatif terhadap PDRB subsektor perkebunan di Pulau Sumatera sedangkan Pengeluaran Pemerintah tidak signifikan terhadap PDRB subsektor perkebunan di Pulau Sumatera.

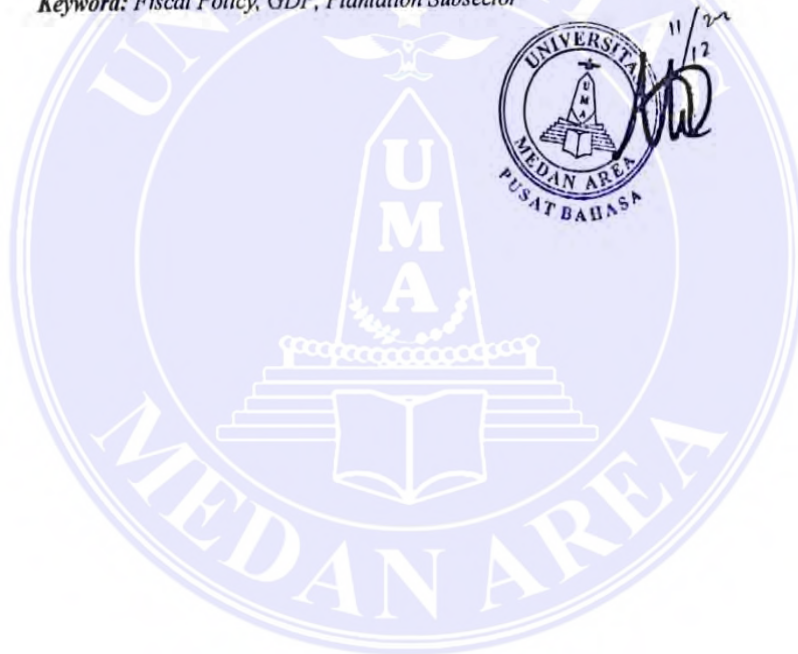
**Kata Kunci:** Kebijakan fiskal, PDRB, Subsektor Perkebunan.



### ABSTRACT

*This research aimed to determine the impact of fiscal policy on the GDP of the plantation subsector in Sumatra Island. Data analysis was conducted using Microsoft Excel and Eviews 12. The data used were panel data with a cross-section of 10 provinces on the island of Sumatra and a time series of 5 years. (2018-2022). The research results indicated that the plantation subsector in Sumatra Island from 2018-2022 has shown an annual increase, particularly in North Sumatra Province and Riau Province. Based on the research results, the appropriate model is the Fixed Effect Model. (FEM). The factors that have a significant and positive impact on the GDP of the plantation subsector in Sumatra Island are Domestic Investment (PMDN) and Labor Absorption. Foreign Investment has a negative impact on the GDP of the plantation subsector in Sumatra Island, while Government Expenditure is not significant to the GDP of the plantation subsector in Sumatra Island.*

**Keyword:** Fiscal Policy, GDP, Plantation Subsector



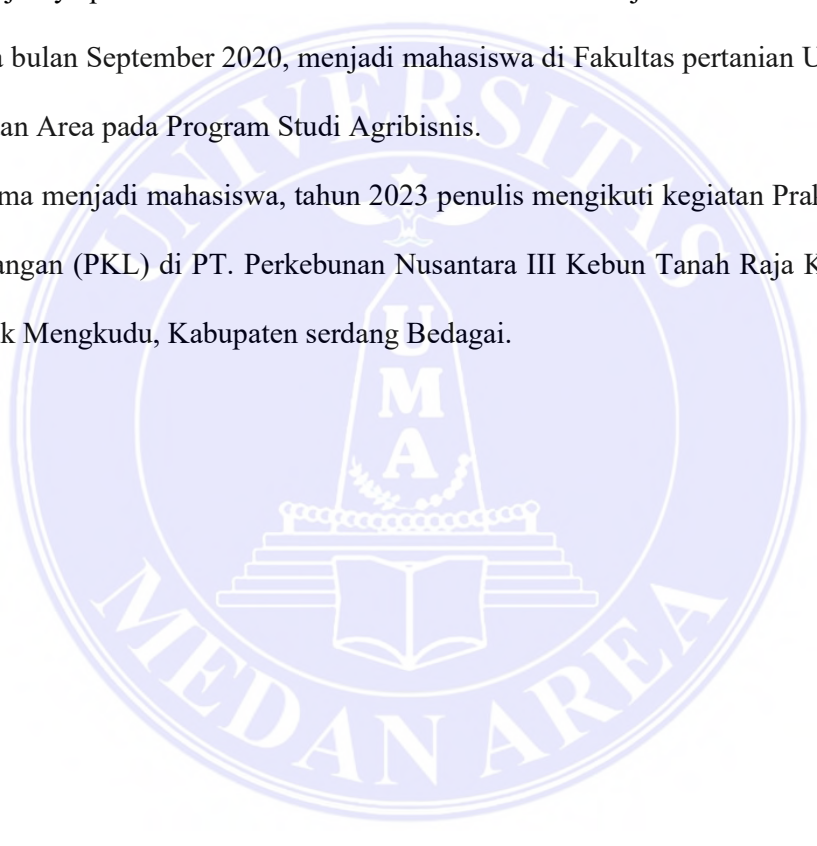
## RIWAYAT HIDUP

Widya Anisa Rahmadani dilahirkan pada tanggal 7 Desember 2001 di Sei Semayang, Sumatera Utara. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Widodo Tjiptomiharjo Tirtodipoero dan Yuni Astuti.

Pendidikan SD Negeri 101738 Sumber Melati Diski dan SMP Negeri 1 Sunggal, selanjutnya pendidikan di SMA Swasta Ahmad Yani Binjai.

Pada bulan September 2020, menjadi mahasiswa di Fakultas pertanian Universitas Medan Area pada Program Studi Agribisnis.

Selama menjadi mahasiswa, tahun 2023 penulis mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Tanah Raja Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten serdang Bedagai.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi dengan judul “PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PDRB SUBSEKTOR PERKEBUNAN DI PULAU SUMATERA” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penulis juga sepenuhnya sadar akan kekurangan skripsi ini dari kata sempurna akibat keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki Penulis. Demi perbaikan skripsi ini, Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan serta satu pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Dr. Siswa Panjang Hernosa, SP., M.Si selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Medan Area
2. Marizha Nurcahyani, S.ST., M.Sc selaku Ketua Program Studi Agribisnis Universitas Medan Area
3. Siti Sabrina Salqaura, SP., M.Sc. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Widodo Tjiptomiharjo Tirtodipoero dan pintu surgaku Ibu Yuni Astuti. Terimakasih atas pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan serta senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis

mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan mama sehat, panjang umur dan Bahagia selalu.

5. Saudari kandung Penulis, yaitu Lutfika Tania yang menjadi penolong, pendukung dan penghibur di saat Penulis membutuhkan.
6. Teman-teman dekat penulis Pelangi, Tengku Azizah, Citra, Aqila dan Khairul karena telah memberikan doa, masukan serta dukungan dalam proses pengerjaan skripsi ini.
7. Rekan-rekan Besok S.P (Chyntia, Suci, Sania, Balkis, Alfi, Fauzan, Yogi, Naloan, Rino, Rizfad, Riznand) yang telah memberikan semangat dan doa dalam pengerjaan skripsi ini.

Semoga pihak-pihak yang telah disebutkan diatas diberikan kesehatan serta rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak selain dari Penulis sendiri, sekian terimakasih.

Medan, 27 Agustus 2024

Widya Anisa Rahmadani

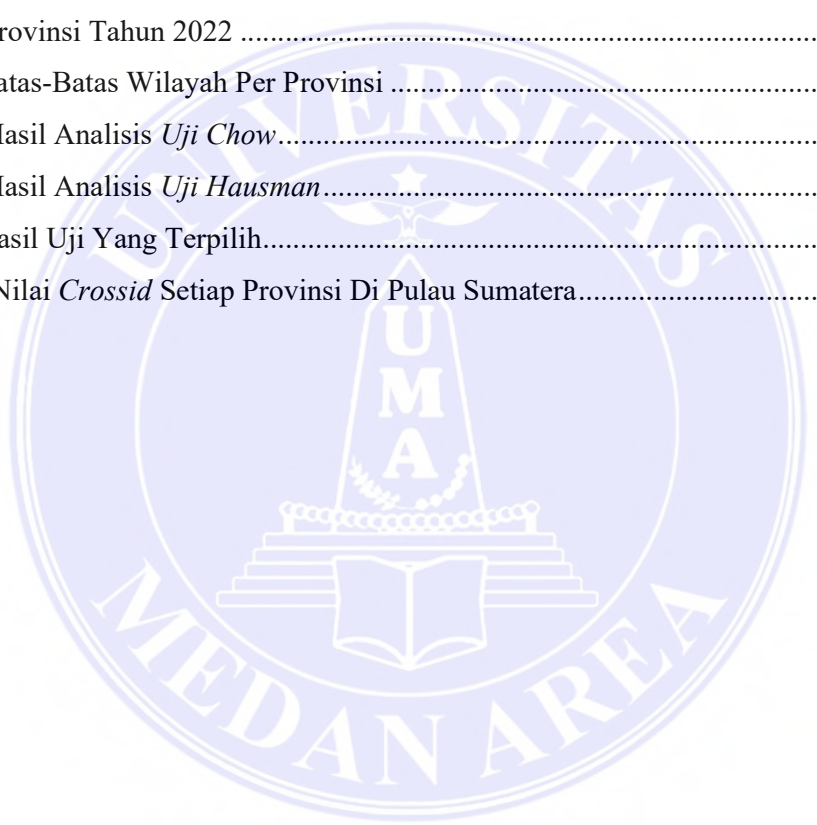
## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Hipotesis Penelitian.....	8
1.5 Kerangka Pemikiran.....	8
1.6 Manfaat Penelitian .....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Makro Ekonomi .....	11
2.2 Kebijakan Fiskal .....	12
2.2.1 Model Kebijakan Fiskal .....	13
2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	14
2.4 Peranan Sektor Pertanian .....	15
2.5 Pengeluaran Pemerintah.....	15
2.6 Penanaman Modal Asing .....	17
2.7 Penanaman Modal Dalam Negeri .....	18
2.8 Serapan Tenaga Kerja .....	20
2.9 Penelitian Terdahulu .....	21
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Metode Penelitian .....	26
3.2 Metode Pemilihan Lokasi Penelitian .....	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.4 Teknik Analisis Data.....	27

3.4.1 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel.....	29
3.5 Defenisi Operasional Variabel .....	34
<b>IV. GAMBARAN UMUM PULAU SUMATERA .....</b>	<b>36</b>
4.1 Gambaran Umum.....	36
4.2 Kondisi Geografi Pulau Sumatera.....	38
4.3 Kondisi Perekonomian Wilayah .....	40
<b>V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
5.1 Hasil Penelitian .....	42
5.1.1 Perkembangan PDRB Subsektor Perkebunan Di Pulau Sumatera.....	42
5.1.2 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PDRB Subsektor Perkebunan Di Pulau Sumatera .....	44
5.1.3 Analisis Uji Model Data Panel.....	45
5.1.4 Hasil Analisis <i>Fixed Effect Model</i> dari Analisis Uji Chow dan Uji Hausman.	47
5.1 Pembahasan.....	51
5.2.1 Perkembangan PDRB Subsektor Perkebunan Di Pulau Sumatera.....	52
5.2.2 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PDRB Subsektor Perkebunan Di Pulau Sumatera .....	54
<b>VI. PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
6.1 Kesimpulan .....	59
6.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR TABEL

No	Keterangan	Halaman
1.	Subsektor Perkebunan di Pulau Sumatera Tahun 2022 (Juta) .....	2
2.	Nilai rata-rata PDRB Pulau Sumatera.....	5
3.	Klasifikasi Ekonomi Belanja Pemerintah .....	17
4.	Sumber Data.....	27
5.	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Provinsi Tahun 2022 .....	36
6.	Batas-Batas Wilayah Per Provinsi .....	39
7.	Hasil Analisis <i>Uji Chow</i> .....	46
8.	Hasil Analisis <i>Uji Hausman</i> .....	46
9.	Hasil Uji Yang Terpilih.....	49
10.	Nilai <i>Crossid</i> Setiap Provinsi Di Pulau Sumatera.....	51



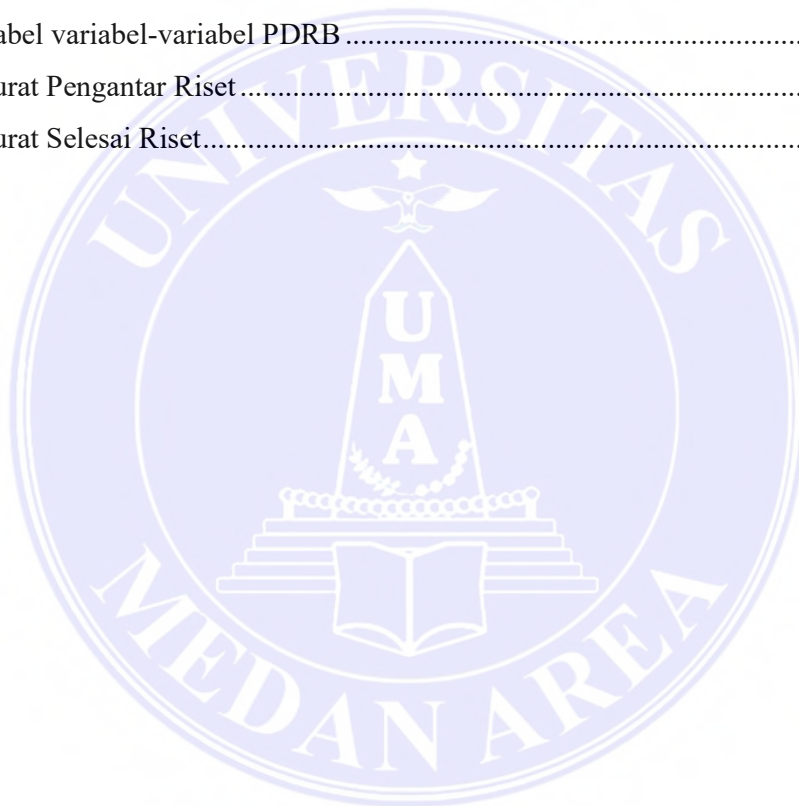
## DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan	Halaman
1.	Total Produk Domestik Regional Bruto Pulau Sumatera Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022.....	4
2.	Skema Kerangka Pemikiran Penelitian.....	9
3.	Peta Pulau Sumatera.....	38
4.	Perkembangan PDRB subsektor perkebunan di Pulau Sumatera tahun 2018-2022(juta rupiah) .....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan	Halaman
1.	Hasil Data Eviews <i>Uji Chow</i> .....	64
2.	Hasil Data Eviews <i>Uji Hausman</i> .....	65
3.	Hasil Eviews <i>Fixed Effect Model</i> .....	66
4.	Hasil Data Eviews <i>Uji Chow</i> .....	67
5.	Data Eviews <i>Uji Hausman</i> dan <i>Fixed Effect Model</i> .....	68
6.	Tabel sektor pertanian tahun 2018-2022 per provinsi.....	69
7.	Tabel variabel-variabel PDRB.....	72
8.	Surat Pengantar Riset.....	75
9.	Surat Selesai Riset.....	75



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan memainkan peran penting dalam penyediaan lapangan kerja, penyediaan pangan dalam negeri, dan kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, sektor pertanian adalah sektor yang paling dasar dalam perekonomian, yang membantu kehidupan produksi sektor lain, seperti subsektor perikanan, perkebunan, dan peternakan (Iskandar, 2005).

Menurut (Prabowo, 2010) sektor pertanian memiliki peranan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi jangka panjang dan pemulihan ekonomi negara. Ini karena sektor pertanian memberikan devisa kepada negara dan memiliki efek pengganda ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, sektor pertanian layak dianggap sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, hal ini tentunya tidak terlepas dari sektor pertanian. Sektor Pertanian mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional khususnya di subsektor perkebunan. Subsektor perkebunan merupakan bagian dari sektor pertanian yang banyak berkontribusi terhadap peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB).

Subsektor perkebunan di Pulau Sumatera memiliki peranan penting dalam perekonomian daerah tersebut. Sumatera merupakan salah satu penghasil utama berbagai komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi, teh, dan cokelat. Kelapa sawit adalah komoditas yang paling dominan di wilayah ini, dengan perkebunan yang tersebar luas di provinsi seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan



Sumatera Selatan. Perkebunan kelapa sawit di Sumatera tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga menjadi salah satu produk ekspor utama Indonesia, memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara.

Subsektor perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya memiliki peranan penting dalam pembangunan. Subsektor perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah Pulau Sumatera dan nasional.

**Tabel 1. Subsektor Perkebunan di Pulau Sumatera Tahun 2022 (Juta)**

No	Provinsi	Subsektor Perkebunan
1	Riau	100.030,70
2	Sumatera Utara	89.944,43
3	Jambi	29.387,06
4	Sumatera Selatan	22.690,63
5	Lampung	16.007,36
6	Sumatera Barat	12.033,28
7	Aceh	11.998,14
8	Kep. Bangka Belitung	4.993,67
9	Bengkulu	2.395,45
10	Kep. Riau	1.063,84
<b>Total</b>		<b>261.157,50</b>

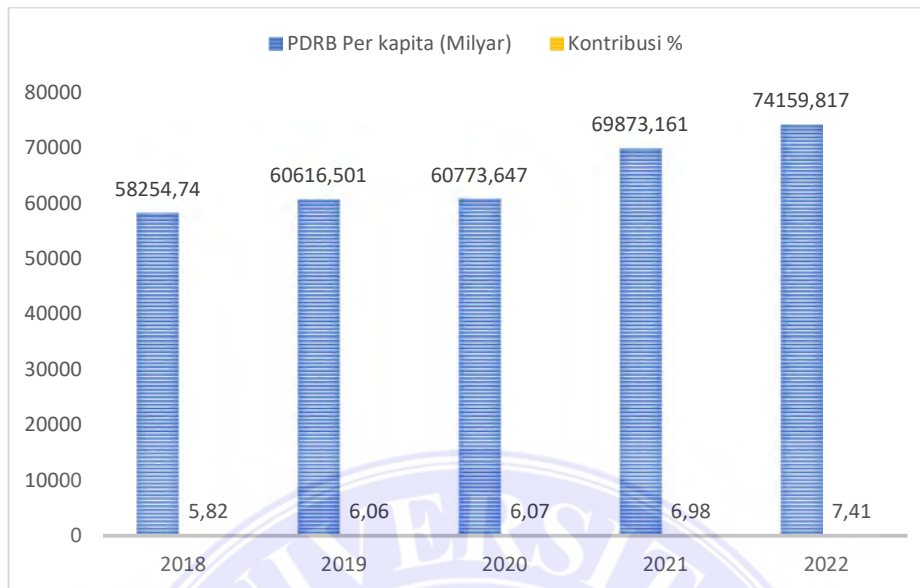
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024

Pada tabel 1, total keseluruhan subsektor perkebunan di Pulau Sumatera yaitu 261.157,5 juta. Subsektor perkebunan tertinggi berada di Provinsi Riau dengan total

subsektor perkebunan sebesar 100.030,7 juta dan subsektor perkebunan terendah berada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu 1,063,84 juta.

Keterkaitan antara subsektor perkebunan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah bahwa subsektor ini memberikan kontribusi besar terhadap PDRB daerah melalui nilai tambah bruto yang dihasilkan dari produksi, pengolahan, dan distribusi komoditas perkebunan. Nilai tambah bruto ini mencerminkan kontribusi ekonomi dari berbagai komoditas seperti kelapa sawit, karet, kopi, teh, dan coklat yang menjadi sumber utama pendapatan bagi masyarakat. Perkebunan tidak hanya menghasilkan produk penting untuk konsumsi domestik dan ekspor, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, kinerja subsektor perkebunan secara langsung mempengaruhi tingkat PDRB, menegaskan pentingnya sektor ini dalam perekonomian daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu ukuran untuk mengukur nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah atau daerah selama periode tertentu, biasanya satu tahun. PDRB mencakup nilai tambah dari semua sektor ekonomi yang ada di wilayah tersebut, termasuk pertanian, industri, konstruksi, perdagangan, jasa, dan sektor lainnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 1. Total Produk Domestik Regional Bruto Pulau Sumatera Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022**

Dilihat dari gambar 1 memperlihatkan bahwa PDRB per kapita di Pulau Sumatera memiliki kontribusi yang sangat baik dari tahun 2018 yaitu sebesar 5,82% hingga tahun 2022 sebesar 7,41% maka dapat disimpulkan bahwa pulau Sumatera memiliki per kapita mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Hampir sebagian besar Provinsi di Indonesia termasuk Provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera masih mengandalkan sektor pertanian. Pulau Sumatera dikenal sebagai pulau yang memiliki hasil bumi yang melimpah, khususnya pada hasil tanaman perkebunan. Hasil bumi ini merupakan keuntungan komperatif yang dimiliki Pulau Sumatera.

Potensi antara daerah yang berbeda disebabkan oleh sumber daya alam, terbatasnya sarana dan prasarana, perbedaan kesuburan tanah maupun perbedaan kondisi daerah secara geografis (Harefa, 2010). Diperlukan kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

**Tabel 2. Nilai rata-rata PDRB Pulau Sumatera**

No	Provinsi	Sub. Perkebunan	PMA	PMDN	Peng. Pemerintah	Serapan T.K
1	Aceh	11.114,528	118,14	5.029,38	13.695.195,6	2.391.918
2	Sumatera Utara	79.525,29	895,68	17.516,80	13.071.065,40	7.191.597
3	Sumatera Barat	11.297,57	125,2	3.037,14	6.706.154,80	2.645.815,40
4	Riau	91.969,96	1563	27.504,24	8.695.754,80	3.170.783
5	Sumatera Jambi	26.600,63	54,74	5.182,50	4.475.163,60	1.749.017,00
6	Sumatera Selatan	20.766,34	1.169,00	16.411,66	9.253.829,00	4.224.054,60
7	Bengkulu	2.193,50	109,92	5.528,18	2.898.974,00	1.048.764,60
8	Lampung Kep. Bangka	15.706,97	241,5	7.637,30	6.708.689,40	4.419.256,20
9	Belitung	4.703,31	71,56	3.575,66	2.491.427,20	724.211,00
10	Kep.Riau	1.122,90	1.164,36	7.775,50	3.653.651,20	1.045.626,40

Sumber: *Data Sekunder Diolah, 2024*

Tabel tersebut merupakan data rata-rata kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB di Pulau Sumatera yang diukur dari beberapa indikator, yaitu nilai PDRB subsektor perkebunan (dalam miliar rupiah), Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pengeluaran pemerintah, dan serapan tenaga kerja. Sumatera Utara memiliki kontribusi tertinggi pada subsektor perkebunan dengan rata-rata nilai PDRB sebesar Rp79.525,29 miliar. Provinsi ini juga memiliki Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terbesar, mencapai nilai rata-rata Rp17.516,80 miliar, dan nilai rata-rata Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp895,68 miliar. Serapan tenaga kerja tertinggi terlihat di provinsi ini, dengan nilai rata-rata 7.191.597 orang. Provinsi Riau menjadi salah satu pemain utama dalam subsektor ini, dengan nilai rata-rata PDRB Rp91.969,96 miliar, nilai

rata-rata PMA tertinggi Rp1.563 miliar, dan nilai rata-rata PMDN Rp27.504,24 miliar. Serapan tenaga kerja di provinsi memiliki nilai rata-rata 3.170.783 orang. Lampung memiliki kontribusi besar terhadap subsektor ini dengan nilai rata-rata PDRB Rp15.706,97 miliar. nilai rata-rata PMA di provinsi ini mencapai Rp241,5 miliar, sementara nilai rata-rata PMDN berada di angka Rp7.637,30 miliar. Dengan nilai rata-rata serapan tenaga kerja sebanyak 4.419.256 orang, provinsi ini menjadi salah satu pusat pertumbuhan perkebunan di Sumatera. Sumatera Selatan memiliki nilai rata-rata PDRB subsektor perkebunan sebesar Rp20.766,34 miliar. nilai rata-rata PMA di provinsi ini mencapai Rp1.169 miliar, sementara nilai rata-rata PMDN berada di angka Rp16.411,66 miliar. Serapan tenaga kerja memiliki nilai rata-rata 4.224.054 orang. Aceh menunjukkan nilai rata-rata PDRB subsektor perkebunan Rp11.114,528 miliar dengan nilai rata-rata PMA sebesar Rp118,14 miliar dan nilai rata-rata PMDN Rp5.029,38 miliar. Penyerapan tenaga kerja mencapai 2.391.918 orang. Jambi memiliki nilai rata-rata PDRB subsektor perkebunan sebesar Rp26.600,63 miliar dengan nilai rata-rata PMA yang relatif kecil, yaitu Rp54,74 miliar. Namun, nilai rata-rata PMDN di provinsi ini cukup signifikan, yakni Rp5.182,50 miliar, dengan serapan tenaga kerja sebesar 1.749.017 orang.

Pemerintah Indonesia mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk pertanian, dengan tujuan meningkatkan produksi, meningkatkan infrastruktur, dan mendukung para petani. Keterlibatan keuangan ini sangat penting di sebuah negara di mana jutaan keluarga bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian mereka. Beberapa wilayah dengan potensi pertanian yang signifikan mungkin menerima dukungan yang tidak memadai, yang mengakibatkan kesenjangan dalam pertumbuhan dan peluang pembangunan.

Terakhir, diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut dalam praktik-praktik pertanian ini agar semakin relevan dengan masalah yang dihadapi di Indonesia demi perkembangan yang berkelanjutan.

Penulis meyakini bahwa analisis semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah mendukung pertumbuhan pertanian yang berkelanjutan, memberi manfaat bagi semua wilayah dengan adil, dan memperkuat keamanan pangan dan pembangunan ekonomi Indonesia.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan PDRB subsektor perkebunan di Pulau Sumatera?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan fiskal terhadap PDRB subsektor perkebunan di Pulau Sumatera?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perkembangan PDRB subsektor perkebunan di Pulau Sumatera.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan fiskal terhadap PDRB subsektor perkebunan di Pulau Sumatera.

#### 1.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang menjadi subjek penelitian. Kebenaran dari jawaban ini masih perlu dibuktikan atau diuji secara empiris. Hipotesis yang diajukan pada penelitian dengan judul “Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Subsektor Perkebunan di Pulau Sumatera” yaitu sebagai berikut:

1. Diduga terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perkebunan Pulau Sumatera.
2. Diduga terdapat pengaruh penanaman modal asing (PMA) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perkebunan Pulau Sumatera.
3. Diduga terdapat pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perkebunan Pulau Sumatera.
4. Diduga terdapat pengaruh Serapan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Perkebunan pulau Sumatera.

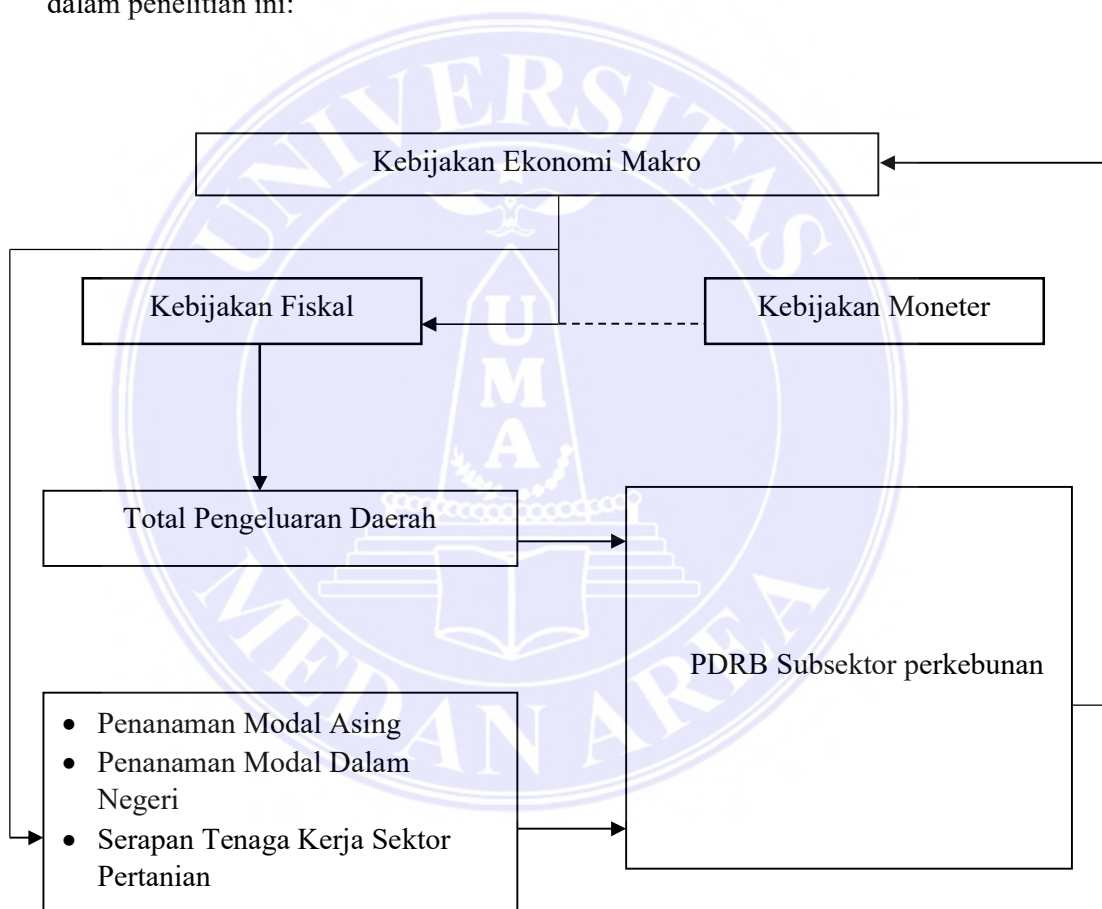
#### 1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran menggambarkan bagaimana variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah memengaruhi subsektor perkebunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Sumatera.

Negara agraris seperti di Indonesia, investasi di bidang perkebunan memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan komoditas unggulan serta kerjasama dengan pemerintah dan swasta dengan

melakukan kemitraan kepada pemerintah untuk program revitalisasi perkebunan rakyat.

Berdasarkan pernyataan tersebut, kita dapat memberikan penjelasan singkat tentang variabel-variabel yang mempengaruhi PDRB subsektor perkebunan Pulau Sumatera. Bagan kerangka pemikiran berikut menunjukkan pengaruh terhadap PDRB subsektor perkebunan dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya dalam penelitian ini:



**Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran Penelitian**

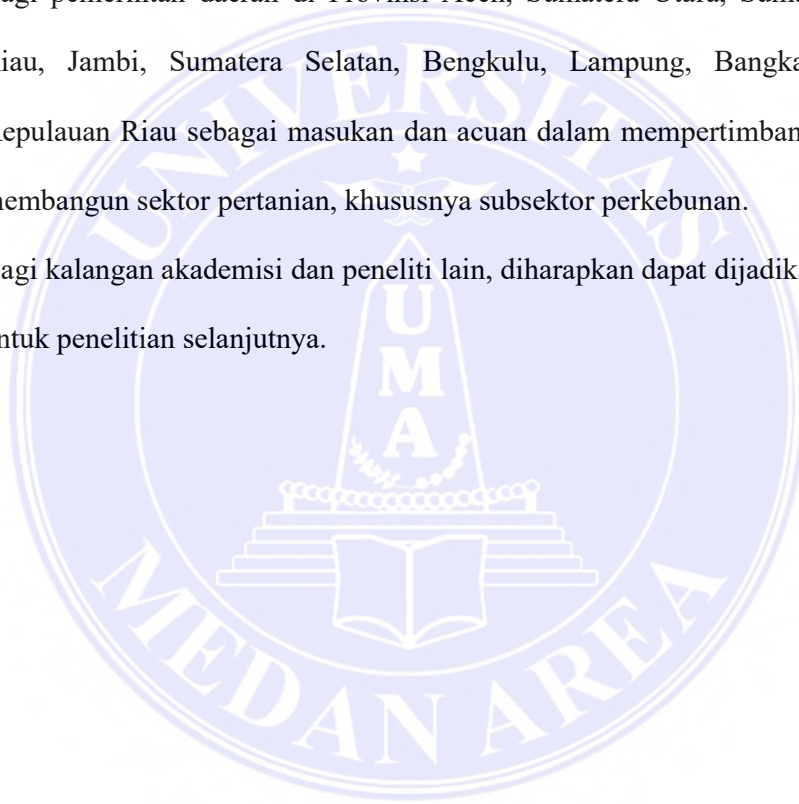
Ket: Garis putus-putus tidak dianalisis



## 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi penulis, penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S1 dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pertanian (SP) di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Medan Area.
2. Bagi pemerintah daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau sebagai masukan dan acuan dalam mempertimbangkan untuk membangun sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan.
3. Bagi kalangan akademisi dan peneliti lain, diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Makro Ekonomi

Kebijakan ekonomi makro dapat dibagi menjadi kebijakan fiskal dan moneter. Selain itu, ekonomi dapat dibagi menjadi dua bagian, sektor riil dan moneter. Sektor riil menghasilkan barang dan jasa, dan juga disebut sebagai sisi produksi ekonomi. Sektor moneter adalah hasil dari sektor riil, atau sisi moneter ekonomi. Pemerintah mempengaruhi pertumbuhan dan stabilitas sektor riil melalui kebijakan fiskal, yang di Indonesia dilakukan oleh Menteri Keuangan. Sementara pemerintah mempengaruhi sektor moneter melalui kebijakan moneter, yang sepenuhnya ditanggung oleh Bank Indonesia.

1. Kebijakan Fiskal: Kebijakan fiskal melibatkan penggunaan pengeluaran pemerintah dan perpajakan untuk memengaruhi ekonomi. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan makroekonomi tertentu, seperti mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi pengangguran (Mankiw, 2019)
2. Kebijakan Moneter: Kebijakan moneter adalah pengendalian pasokan uang dan tingkat bunga oleh bank sentral. Tujuannya adalah mencapai objektif ekonomi seperti stabilitas harga, pencapaian penuh lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil (Mankiw, 2019)

## 2.2 Kebijakan Fiskal

Menurut M. Nur Riyanto (2010) kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran negara atau dengan mengubah anggaran belanja negara. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN, penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai kestabilan ekonomi yang diinginkan pada umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan dikenal sebagai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal juga mencakup peraturan yang mengatur penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, dan pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilitas atau Pembangunan menurut I Wayan Sudirman. "Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah," menurut Zaini Ibrahim.

Pada dasarnya, ada dua jenis kebijakan fiskal. Pertama adalah kebijakan fiskal ekspansif, yang melakukan peningkatan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini digunakan saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran tinggi. Kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif, yang melakukan penurunan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak netto untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

### 2.2.1 Model Kebijakan Fiskal

Menurut Drummond *et al.*, (2004) Dalam konteks ini, dua model kebijakan ekonomi makro yang paling umum adalah model Keynesian dan model klasik. Dua model ini akan dibahas berikut:

#### a. Model klasik

Menurut model klasik, ekonomi makro akan mengembalikan keseimbangan jika tingkat harga naik. Menurut hukum pasar, penawaran akan menciptakan permintaan. Prinsip *Laissez-faire* klasik tidak melakukan apapun disarankan oleh model klasik. Dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu intervensi dalam ekonomi makro atau tidak melakukan apa pun (Drummond *et al.*, 2004).

Belanja pemerintah akan meningkatkan output, menurut model klasik, tetapi dengan cara yang berbeda. Analisis klasik lebih berkonsentrasi pada fakta bahwa meningkatkan output, yaitu ketika belanja pemerintah lebih besar daripada penerimaan, maka pajak yang akan datang akan digunakan untuk membayar pengeluaran yang tidak diperlukan. Dalam model klasik, output akan meningkat karena pekerja miskin karena pajak yang tinggi membuat mereka membayar pajak. Akibatnya, pekerja akan bekerja lebih banyak, yang berarti lebih banyak orang akan bekerja (Abel *et al.*, 2008).

#### b. Model Keynesian

Menurut Model Keynesian, yang dikutip oleh Drummond *et al.* (2004), ekonomi makro tidak selalu dapat melakukan penyesuaian sendiri, sehingga pemerintah pusat dapat menggunakan kekuatan pajak dan belanja untuk menstimulasi ekonomi. Karena efisiensi upah, model Keynesian tidak bergantung

pada penawaran tenaga kerja, dan oleh karena itu, peningkatan belanja pemerintah tidak berdampak atau tidak berdampak pada ekonomi makro. Namun, output dipengaruhi oleh peningkatan permintaan agregat melalui peningkatan belanja pemerintah. Perusahaan memenuhi permintaan tambahan pada tingkat harga awal, sehingga output meningkat di atas tingkat pengangguran penuh atau pengangguran nol dalam jangka pendek. Menurut model Keynesian dalam Abel et al. (2008), tingkat output dan tenaga kerja dapat sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, yaitu keputusan pemerintah tentang belanja pemerintah dan pajak.

### **2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB mencakup semua elemen permintaan akhir, yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba swasta; (2) pengeluaran pemerintah; (3) pembentukan modal tetap domestik bruto; (4) perubahan stok; dan (5) ekspor neto, yang merupakan ekspor setelah mengurangi impor (Hasan, 2009). Produk domestik adalah semua barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang lebih dikenal sebagai penghitungan produk domestik ini, adalah salah satu indikator makro yang dapat konstan yang masing-masing interpretasi datanya berbeda (Kuncoro, 2004).

PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan, adalah indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

## 2.4 Peranan Sektor Pertanian

Salah satu sektor andalan yang berkontribusi besar pada PDRB adalah pertanian; peranannya dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena banyak orang di negara-negara miskin bergantung pada sektor ini untuk hidup. Satu-satunya cara bagi para perencanaan untuk meningkatkan kemakmuran penduduk yang tinggal di sektor pertanian jika mereka benar-benar memperhatikan kemakmuran masyarakatnya. Meningkatkan produksi tanaman pangan dan perdagangan mereka, serta meningkatkan harga yang mereka terima untuk produk yang mereka hasilkan, adalah dua cara yang dapat digunakan untuk mencapai metode ini (Arsyad, 1992:413).

Mubyarto (1995) berpendapat bahwa pertanian memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, ia memainkan peran dalam menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan, dan menghasilkan uang asing. Sektor pertanian, industri, dan jasa adalah semua sektor yang saling terkait dalam proses pembangunan ekonomi.

Selama bertahun-tahun, pertanian memainkan peran yang signifikan dalam pendapatan nasional dan regional di Indonesia, dan karena itu terus mendominasi pendapatan daerah. Namun, tidak dapat disangkal bahwa seiring berjalannya waktu, peran pertanian semakin menurun dalam pendapatan nasional dan regional, sehingga sektor lain mengambil peran ini (Soekartawi, 2003).

## 2.5 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dari perekonomian. Konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran

pemerintah, dan ekspor neto membentuk permintaan agregat. Pembelian dan belanja pemerintah adalah barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah pusat dan daerah.

Pengeluaran pemerintah Indonesia dibagi menjadi tiga tingkat pemerintahan. Pengeluaran di tingkat pusat, yang ditunjukkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah tingkat pertama. Pengeluaran pemerintah provinsi, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, adalah bagian dari APBN, yang dihasilkan dari berbagai pos pengeluaran yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, meskipun sebagian dari pengeluaran tersebut dilakukan di luar negeri. APBD provinsi dibelanjakan dalam berbagai pos pengeluaran di luar wilayah provinsi. APBD kabupaten/kota, di sisi lain, dibelanjakan dalam berbagai pos pengeluaran di luar wilayah kabupaten/kota.

Belanja pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diklasifikasikan menurut fungsinya berdasarkan urusan pemerintahan. Ini mencakup belanja urusan wajib, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan, catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum dan kepegawaian pembangunan desa dan masyarakat, statistik, arsip, komunikasi, dan informatika. Namun, belanja dapat dikategorikan berdasarkan urusan yang dipilih. Ini mencakup pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, dan industri (Depkeu, 2005).

**Tabel 3. Klasifikasi Ekonomi Belanja Pemerintah**

1	Belanja Pegawai	Merupakan kompensasi finansial atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas tugas yang telah mereka selesaikan. Tidak termasuk pekerjaan yang terkait dengan pembentukan modal. Gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, vakasi, dan kontribusi sosial adalah beberapa contoh bagaimana dana ini digunakan.
2	Belanja Barang	Belanja ini digunakan untuk membeli barang atau jasa yang habis untuk membuat barang dan jasa yang dipasarkan dan tidak dipasarkan, serta untuk pengadaan barang dan jasa, perawatan, dan perjalanan.
3	Belanja Modal	Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, yang mencakup pengeluaran untuk tanah, peralatan, mesin, gedung, jaringan, dan bentuk fisik lainnya seperti buku, hewan, dan lainnya
4	Beban Bunga	pembayaran yang dilakukan atas kewajiban pembangunan pokok utang—utang dalam negeri dan luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman
5	Subsidi	Anggaran yang dialokasikan kepada organisasi atau perusahaan yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga harga jualnya dapat diterima oleh masyarakat. Subsidi diberikan kepada bisnis swasta dan pemerintah, antara lain, dari dana ini.
6	Bantuan Sosial	uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat untuk mengurangi risiko sosial. Bantuan sosial ini dapat diberikan langsung kepada anggota masyarakat atau lembaga sosial.
7	Hibah	Penyerahan dana kepada negara lain atau organisasi internasional tidak memiliki konsekuensi hukum.
8	Belanja Lain-lain	Pengeluaran/belanja pemerintah pusat selain yang tercantum di nomor 1 hingga 7 di atas.

*Sumber: Badan Analisa Fiskal, 2005*

## 2.6 Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal asing lainnya.



Modal asing dapat berasal dari negara asing, individu, badan usaha, badan hukum, atau badan hukum asing yang memiliki sebagian atau seluruh modalnya.

Menurut UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), penanaman modal asing yang dilakukan secara langsung oleh pemilik modal asing dan digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Sedangkan pengertian Modal Asing antara lain:

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
2. Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia.
3. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Penanaman Modal Asing (PMA) lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan adil (andil) dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru.

## **2.7 Penanaman Modal Dalam Negeri**

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Prasetyo, 2011), didefinisikan sebagai perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik

Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan menggunakan modal dalam negeri.

Dalam Pasal 1, UU Nomor 6 tahun 1968 dan Nomor 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), definisi modal dalam negeri didefinisikan sebagai berikut:

1. "Modal dalam negeri" yang dimaksud oleh undang-undang ini adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda yang dimiliki oleh Negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan untuk menjalankan bisnis sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing.
2. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri yang disebutkan dalam ayat 1 pasal ini dapat berupa individu atau badan hukum yang didirikan sesuai dengan hukum Indonesia. Pasal 2 menyatakan bahwa "Penanaman Modal Dalam Negeri" yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah penggunaan kekayaan yang disebutkan dalam Pasal 1 untuk menjalankan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan penanaman modal di wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal.

Meskipun Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki banyak keuntungan, seperti menghemat devisa domestik, mengurangi ketergantungan pada barang-barang asing, dan mendorong kemajuan industri nasional melalui hubungan ke depan dan ke belakang. Selain itu, mereka membantu dalam proses penyerapan tenaga kerja.

## 2.8 Serapan Tenaga Kerja

Menurut Simanjuntak (1985), penyerapan tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang terserap, tersebar di berbagai industri dan mempekerjakan sejumlah besar orang, yang pada umumnya menghasilkan jumlah barang dan jasa yang relatif besar. Laju pertumbuhan setiap sektor berbeda, begitu juga kemampuan setiap sektor untuk menyerap tenaga kerja.

Dalam kuncoro ini, penyerapan tenaga kerja didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang terserap ke pasar tenaga kerja, seperti yang ditunjukkan oleh jumlah lapangan kerja yang telah terisi dan dilihat oleh orang yang bekerja. Karena ada permintaan, penduduk berkeja sendiri dapat terserap Kuncoro (2014).

Menurut Rakhmawati dan Boedirochminarni (2018), penyerapan tenaga kerja adalah jumlah lapangan kerja yang sudah terisi, yang ditunjukkan oleh banyaknya penduduk bekerja dan tersebar di berbagai sektor ekonomi. Permintaan akan tenaga kerja menyebabkan penyerapan tenaga kerja. Secara umum, industri yang mempekerjakan banyak orang menghasilkan jumlah barang dan jasa yang cukup

besar. Laju pertumbuhan setiap sektor berbeda, begitu pula kemampuan setiap sektor untuk menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja adalah ketika permintaan dan penawaran tenaga kerja seimbang, yang memungkinkan penentuan upah keseimbangan dan keseimbangan tenaga kerja. Dalam dunia kerja, penyerapan tenaga kerja berbeda-beda tergantung pada pendidikan, keahlian, atau pengalaman.

Handoko (2015) menyatakan bahwa teori penyerapan tenaga kerja mengacu pada faktor internal dan eksternal. Tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB), tingkat inflasi, pengangguran, dan tingkat bunga dipengaruhi secara eksternal, dan tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, kepuasan kerja, dan modal dipengaruhi secara internal. Jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu disebut penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja ini telah dipekerjakan dan terserap dalam sektor ekonomi di mana hal ini akan berdampak pada produksi barang dan jasa dalam jumlah besar.

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian Marini., dkk (2021) berjudul Analisis Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Dari Sisi Penawaran Agregat Di Provinsi Sumatera Selatan yang mengenai analisis pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan agregat sudah banyak dilakukan, namun analisis pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran agregat terutama pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di Provinsi Sumatera Selatan belum banyak diteliti secara mendalam. Tujuan penelitian untuk menjelaskan perkembangan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2020 dan pengaruh jumlah tenaga kerja sektor pertanian serta jumlah pengeluaran pemerintah sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi

sektor pertanian di Provinsi Sumatera Selatan dari sisi penawaran agregat. Variabel yang digunakan yaitu realisasi pengeluaran pemerintah sektor pertanian dan tenaga kerja sektor pertanian pada 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dan metode analisis regresi data panel dengan software Eviews. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota menurun sejalan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di Provinsi Sumatera Selatan, dan pengeluaran pemerintah sektor pertanian, jumlah tenaga kerja sektor pertanian serta dummy kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 s.d. 2020.

Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Hasil Pertanian di Nigeria Lawal, A. I., *et al.* (2018). Studi ini mengkaji dampak kebijakan fiskal terhadap hasil pertanian di Nigeria dengan menggunakan data resmi terkini. Metrik untuk kebijakan fiskalnya adalah belanja modal pemerintah dan bea masuk pupuk. Penelitian ini menggunakan data time series tahunan yang diperoleh dari buletin statistik tahunan CBN, NCS, dan FIRS yang ditemukan stasioner pada orde  $I(1)$  dan  $I(0)$ . Urutan satuannya uji akar mengarah pada penggunaan metode estimasi ARDL yang digunakan dalam analisis empiris pekerjaan penelitian ini. Studi tersebut menemukan bukti hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel (VAO, GEX, IDMF, dan ACGSF) menggunakan kedua kooperatif Johansen integrasi dan uji ARDL Bounds. Meskipun pengeluaran pemerintah (GEX) untuk sektor pertanian ditemukan secara statistik tidak signifikan dan merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan belanja modal sektor pertanian untuk memastikan

bahwa kontribusinya cukup besar penting. Akibatnya, bea masuk pupuk (IDMF) ditemukan bertanda negatif dan signifikan menunjukkan negatif dampaknya terhadap hasil pertanian. Hal ini menuntut para pengambil kebijakan untuk berhati-hati dalam menggunakan instrumen kebijakan fiskal mencapai tujuan yang diinginkannya.

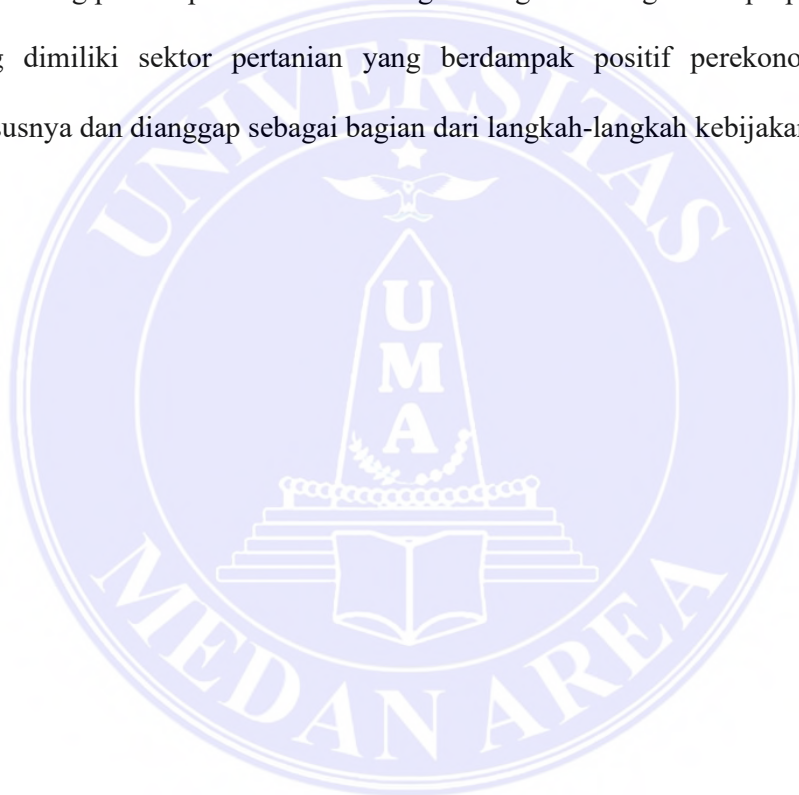
Penelitian yang dilakukan Atmojo (2018) tentang Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Dari data-data empiris tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan pada PDB banyak mengalami penurunan. Untuk meningkatkan PDB Indonesia, maka dilakukan penelitian efektif mana kebijakan moneter atau fiskal dalam mempengaruhi PDB Indonesia. Penelitian ini memakai model IS-LM dengan menggunakan metode Two-Stage Least Square (TSLS) untuk mengestimasi variabel yang ada dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai PDB Indonesia dengan menggunakan IS-LM sebesar 2034769.68 miliar dan tingkat bunga berada di -8.78 persen. multiplier kebijakan fiskal sebesar 0.63 dan nilai multiplier moneter sebesar 1.72.

Salqaura (2018) mengenai Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Sektor Pertanian di Pulau Jawa. Salah satu intervensi pemerintah untuk mendorong peningkatan output sektor pertanian adalah melalui kebijakan fiskal berupa pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang digunakan merupakan total pengeluaran pemerintah secara agregat provinsi. Adanya kebijakan desentralisasi fiskal memberikan kesempatan kepada pemerintah provinsi untuk mengatur alokasi pengeluaran pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan fiskal di Pulau Jawa dengan menggunakan variabel total pengeluaran

pemerintah dan mengetahui pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan serapan tenaga kerja sektor pertanian terhadap PDRB sub-subsektor pertanian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel *fixed effect cross section* SUR. Hasil penelitian menunjukkan total pengeluaran berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB sub-subsektor pertanian yaitu subsektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. PDRB kehutanan tidak dapat dianalisis karena error tidak terdistribusi normal. Serapan tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh negatif signifikan terhadap subsektor perkebunan dan peternakan. Penanaman modal asing berpengaruh positif signifikan terhadap peternakan dan penanaman modal dalam negeri berpengaruh negatif terhadap PDRB subsektor tanaman bahan makanan. Pemerintah provinsi perlu mendukung subsektor pertanian dengan mengalokasikan pengeluaran yang akan meningkatkan PDRB subsektor pertanian dan meningkatkan investasi langsung asing dan investasi domestik ke subsektor pertanian.

Penelitian yang berjudul *The Impact of Fiscal Policy on the Agricultural Domestic Product in Iraq for the Period 1990 – 2020*. Ali J. Abdulhussain, Miqdad Jassim Abd and Hayder Talib Mousa. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dampak instrumen kebijakan fiskal terhadap sektor pertanian dalam negeri produk di Irak untuk periode 1990-2020 melalui analisis ekonomi, statistik dan standar, setelah mengambil gambaran umum tentang serangkaian konsep tentang kebijakan fiskal, tujuan dan alatnya. Selain analisis Realitas ekonomi untuk output pertanian lokal. Studi terapan menunjukkan analisis dampak antara alat kebijakan keuangan (belanja publik, pajak pendapatan, pendapatan publik) pada produk dalam negeri pertanian melalui ekonomi dan standar analisis, dan hasilnya menunjukkan bahwa

peningkatan pendapatan masyarakat mempunyai dampak yang signifikan produk pertanian dalam negeri dan hal ini juga konsisten dengan logika teori ekonomi Belanja pemerintah, meskipun dampaknya tidak signifikan, namun dampaknya positif, yaitu pajak pendapatan datang dalam hubungan terbalik dengan produk domestik pertanian dan hal ini memang demikian konsisten dengan teori ekonomi. Terakhir, meningkatkan proporsi masyarakat negara kontribusi pendapatan dan mendukung produk pertanian dalam negeri dengan meningkatkan proporsi alokasi yang dimiliki sektor pertanian yang berdampak positif perekonomian pada khususnya dan dianggap sebagai bagian dari langkah-langkah kebijakan fiskal.





### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena, baik saat ini maupun sebelumnya, dengan menggunakan analisis dokumen, mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun data kemudian memberikan interpretasi peristiwa yang dapat diamati secara langsung atau tidak langsung. Dalam penelitian ini, analisis data panel digunakan untuk menggambarkan pengaruh kebijakan fiskal terhadap PDRB subsektor perkebunan di Pulau Sumatera. Data penelitian ini menggabungkan data panel dan data cross-section, dari 10 provinsi Sumatera dan rentang waktu lima tahun dari 2018–2022.

#### 3.2 Metode Pemilihan Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Indonesia khususnya pulau Sumatera yaitu provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah sensus dikarenakan seluruh provinsi di Pulau Sumatera dijadikan lokasi penelitian.

#### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya berupa data sekunder secara dokumentasi dimana data-data tersebut merupakan data yang dicatat dari sumber-sumber data atau dokumen yang sudah ada. Data sekunder umumnya berupa bukti,

catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data-data yang digunakan dalam penelitian merupakan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) berupa data PDRB pulau Sumatera, subsektor perkebunan, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, pengeluaran pemerintah serta serapan tenaga kerja dari pemerintah provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung untuk periode 2018–2022.

**Tabel 4. Sumber Data**

No	Jenis Data	Sumber
1	PDRB Sub Perkebunan	Badan Pusat Statistik
2	Penanaman Modal Asing	Badan Pusat Statistik
3	Penanaman Modal Dalam Negeri	Badan Pusat Statistik
4	Serapan Tenaga Kerja	Badan Pusat Statistik
5	Pengeluaran Pemerintah	Badan Pusat Statistik

### 3.4 Teknik Analisis Data

Data diproses dengan menggunakan program komputer Microsoft Excel dan aplikasi Eviews 12. Ada tiga metode estimasi data panel yaitu *Common Effect* (PLS), *Fixed Effect* (FEM), dan *Random Effect* (REM). Memilih permodelan terbaik pasti harus dilakukan selama pengujian. Jadi, uji *Hausman* dan uji *Chow* adalah dua metode pengujian yang biasa digunakan.

1. Koefisien tetap antar waktu dan individu (*Common Effect*)

Menurut Widarjono (2009). Model ini menggabungkan data cross-section dengan rangkaian waktu dan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Model ini dianggap sebagai model paling sederhana dibandingkan dengan *Fixed Effect* (FE), dan *Random Effect* (RE). Ini dianggap sebagai pendekatan yang paling sederhana karena menggabungkan data silang waktu dengan data runtut waktu tanpa memperhatikan dimensi waktu ataupun individu.

2. Model Efek Tetap (*fixed effect*)

Dalam model fixed effect, intercept setiap subjek (cross section) berbeda, tetapi slope tidak berubah seiring waktu. Model ini mengasumsikan bahwa intercept setiap subjek berbeda, tetapi slope antar subjek tetap sama (Gujarati, 2004). Kuncoro (2012) mengatakan model ini mengasumsikan bahwa intercept setiap subjek berbeda, tetapi slope antar subjek tetap sama. Variabel dummy digunakan untuk membedakan antara satu subjek dengan subjek lainnya. *Fixed effects* merupakan perbedaan antar individu (cross section) dapat dimudahkan oleh perbedaan intersep. Pada metode regresi berupa intersep ini, variabel dummy digunakan untuk menjelaskan perbedaan yang terjadi antar intersep, sehingga hasil regresi berupa intersep dapat memiliki nilai yang tidak tetap dan berubah-ubah sesuai dengan waktu dan individu masing-masing data. Model estimasi *Least squares dummy variables* (LSDV) dapat digunakan untuk merefleksikan teknik ini. Koefisien intersep asumsi bervariasi, tetapi slope memiliki nilai konstan.

3. Estimasi dengan pendekatan *Random effect*

Dalam model Random Effect, variabel gangguan (error term) memiliki hubungan antara individu dan waktu. Dalam model ini, perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masalah dapat diselesaikan. Model ini adalah model regresi panel. Kelebihan model ini memiliki kemampuan untuk menghilangkan heteroskedastisitas dengan menggunakan model Random Efek. Model ini juga dikenal sebagai *Error Component Model (ECM)* dan *Generalized Least Square Technique (GLS)*.

**Model Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap PDRB Subsektor Perkebunan**

$$\text{LOG(PDRBSPKN)} = a_0 + a_1*\text{LOG(TEXP)} + a_2*\text{LOG(PMA)} + a_3*\text{LOG(PTKSP)} + a_4*\text{LOG(PMDN)} + u_1 \dots \dots \dots 3.4$$

Tanda estimasi yang diharapkan  $d_1, d_2, d_3, d_4 > 0$

Keterangan:

- PDRBSPKN = PDRB Subsektor Perkebunan (Milyar rupiah)
- TEXP = Total Pengeluaran Daerah (Juta rupiah)
- PMA = Penanaman Modal Asing (Juta Dollar)
- PTKSP = Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian (Juta/jiwa)
- PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri (Milyar rupiah)

**3.4.1 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel**

Dari ketiga model yang telah diestimasi akan dipilih model mana yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian kali ini. Ada tahapan uji (test) yang dapat dijadikan alat dalam pemilihan model regresi data panel (CEM, FEM atau REM). Ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan hasil yang tepat dan efisien. Untuk

memilih model terbaik, uji ini menggunakan tiga metode *Uji Chow*, *Uji Hausman*, dan *Uji Breusch Pagan*. Ketiga eksperimen tersebut menggunakan semua persamaan, yaitu:

### 3.4.1.1 Uji Chow Test (*Common Effects vs Fixed Effects*)

*Uji Chow-Test* bertujuan untuk menguji atau juga membandingkan dan memilih model mana yang terbaik apakah model *Common Effect* atau *Fixed Effect* yang akan digunakan untuk melakukan regresi data panel.

Persamaan uji F dalah (Gujarati & Porter, 2009)

$$F = \frac{(R^2_{ur} - R^2_r) / (m)}{(1 - R^2_{ur}) / (n - k)}$$

Keterangan:

$R^2_r$  =  $R^2$  model *Common Effect Model* (CEM)

$R^2_{ur}$  =  $R^2$  model *Fixed Effect Model* (FEM)

M = jumlah restriksi atau pembatasan di dalam model tanpa variabel *dummy* (*restricted variabel*)

n = jumlah sample

k = jumlah variabel penjelas

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *Uji Chow-Test* adalah sebagai berikut:

- 1) Estimasi dengan *Fixed Effect*
- 2) Uji dengan menggunakan *Chow-test*
- 3) Melihat nilai probability F dan *Chi-square* dengan asumsi :
  - a) Bila nilai probability F dan *Chi-square*  $> \alpha = 5\%$ , maka uji regresi panel data menggunakan model *Common Effect*.

- b) Bila nilai probability F dan *Chi-square*  $< \alpha = 5\%$ , maka uji regresi panel data menggunakan model *Fixed Effect*

Hipotesis yang digunakan pada uji F ini adalah:

H0: *Common Effect* (CE)

H1: *Fixed Effect* Model

H0: ditolak jika nilai F hitung  $> F$  tabel, atau bisa juga dengan:

H0: ditolak jika nilai Probabilitas  $F < \alpha$  (dengan  $\alpha 5\%$ )

Uji F dilakukan dengan memperhatikan nilai probabilitas (Prob.) untuk *Cross-section* F. Jika nilainya  $> 0,05$  (ditentukan di awal sebagai tingkat signifikansi atau alpha) maka model yang terpilih adalah CEM, tetapi jika  $< 0,05$  maka model yang terpilih adalah FEM.

- 4) Bila berdasarkan Uji *Chow-Test* model yang terpilih adalah *Common Effect*, maka langsung dilakukan uji regresi data panel. Tetapi bila yang terpilih adalah model *Fixed Effect*, maka dilakukan Uji *Hausman-Test* untuk menentukan antara model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang akan dilakukan untuk melakukan uji regresi data panel.

### 3.4.1.2 Uji breusch-pagan Lagrange Multiplier (*Common Effects vs Random Effects*)

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) memiliki tujuan untuk membandingkan antara metode *common effects* dengan metode *random effects*. Uji LM ini dikembangkan oleh *Breusch Pagan Formula* LM sebagai berikut (Widarjono 2013).

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left( \frac{\sum_{i=1}^n (\sum_{t=1}^T \hat{e}_{it})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{e}_{it}^2} - 1 \right)^2 = \frac{nT}{2(T-1)} \left( \frac{\sum_{i=1}^n (\sum_{t=1}^T \hat{e}_{it})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{e}_{it}^2} - 1 \right)^2$$

Keterangan:

$n$  = Jumlah individu

$T$  = Jumlah periode waktu!

$E$  = Residual pendekatan OLS

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *Lagrange Multiplier-Test* adalah sebagai berikut:

1. Estimasi dengan *Common Effect*
2. Uji dengan menggunakan *Lagrange Multiplier-Test*
3. Melihat nilai *probability F* dan *Chi-square* dengan asumsi:
  - a) Bila nilai *probability F* dan *Chi-square*  $> \alpha = 5\%$ , maka uji regresi panel data menggunakan model *Common Effect*.
  - b) Bila nilai *probability F* dan *Chi-square*  $< \alpha = 5\%$ , maka uji regresi panel data menggunakan model *Random Effect*

Hipotesis:

$H_0$ : *Common Effect Model*

$H_1$ : *Random Effect* Jika nilai probabilitas dalam uji

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) lebih kecil dari 5% maka  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa model yang cocok digunakan dalam persamaan analisis regresi tersebut adalah model random effect. Dan sebaliknya jika nilai probabilitas dalam uji. Uji *Lagrange Multiplier* (LM) lebih besar dari 5% maka  $H_1$  diterima.

### 3.4.1.3 Uji Hausman

Uji *Hausman Test* dilakukan untuk membandingkan atau juga memilih model mana yang terbaik antara *Fixed effects* dengan *Random effects* yang akan

digunakan untuk melakukan regresi data panel. Uji *Hausman* digunakan apabila model *fixed effect* dan *cross-section* diketahui signifikan kemudian akan diputuskan yang mana yang lebih baik dengan membandingkan kedua model tersebut (Rashid *et al.*, 2016)

Uji *Hausman* yang digunakan mengikuti kriteria *Wald* dengan menggunakan nilai statistik yang mengikuti distribusi *chi-square*, sebagai berikut (Baltagi, 2005).

$$W = x^2[K] = [\hat{\beta}, \hat{\beta}_{GLS}] \Sigma^{-1} [\hat{\beta} - \hat{\beta}_{GLS}]$$

Langkah-langkah yang dilakukan dalam Hausman-Test adalah sebagai berikut:

- 1) Estimasi dengan *Random Effect*
- 2) Uji dengan menggunakan *Hausman-test*
- 3) Melihat nilai *probability F* dan *Chi-square* dengan asumsi:
  - a) Bila nilai *probability F* dan *Chi-square*  $> \alpha = 5\%$ , maka uji regresi panel data menggunakan model *Random Effect*.
  - b) Bila nilai *probability F* dan *Chi-square*  $< \alpha = 5\%$ , maka uji regresi panel data menggunakan model *Fixed Effect*.

Hipotesis sebagai berikut:

$H_0$ : *Random Effect Model*

$H_1$ : *Fixed Effect Model*

Ho ditolak jika *P-value* lebih kecil dari nilai  $\alpha$ .

Ho diterima jika *P-value* lebih besar dari nilai  $\alpha$ .

Nilai  $\alpha$  yang digunakan adalah 5%.

Uji *Hausman* dilihat menggunakan nilai probabilitas dari *cross section random effect model*. Jika nilai probabilitas dalam uji *Hausman* lebih kecil dari 5% maka



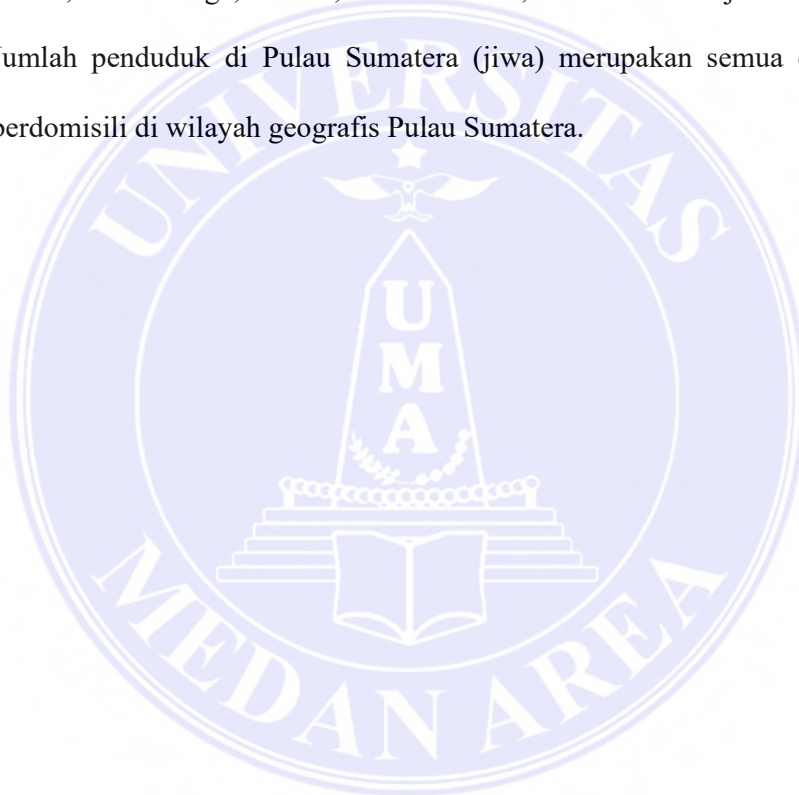
Ho ditolak yang berarti bahwa model yang cocok digunakan dalam persamaan analisis regresi tersebut adalah model *fixed effect*. Dan sebaliknya jika nilai probabilitas dalam uji *Hausman* lebih besar dari 5% maka  $H_a$  diterima

### 3.5 Defenisi Operasional Variabel

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda atas pengertian di dalam penelitian ini, maka penulis membuat definisi dan batasan operasional sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Milyar Rupiah) subsektor perkebunan merupakan variabel dependen. Jumlah PDRB menurut harga konstan pada subsektor pertanian yang terserap di Pulau Sumatera. Data operasional diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan perhitungan tahunan pada 10 (sepuluh) Provinsi yang ada di Pulau Sumatera dengan kurun waktu sejak tahun 2018 hingga tahun 2022.
2. Penanaman Modal Asing (PMA) (Juta US\$) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan perhitungan tahunan pada 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera dengan kurun waktu sejak tahun 2018 hingga 2022.
3. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Milyar Rupiah) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan perhitungan tahunan pada 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera dengan kurun waktu sejak tahun 2018 hingga 2022.
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Milyar Rupiah) yang digunakan ini adalah PDRB per kapita AHDK tahun 2010.
5. PRDB subsektor perkebunan atas dasar harga konstan tahun 2022
6. Total pengeluaran daerah (Juta Rupiah) merupakan jumlah total dari alokasi pengeluaran pemerintah berupa belanja aparatur daerah dan belanja publik.

7. Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau wilayah.
8. Pengeluaran pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, beban bunga, subsidi, bantuan social, hibah dan belanja lain-lain.
9. Jumlah penduduk di Pulau Sumatera (jiwa) merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Pulau Sumatera.



## VI. PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan mengenai Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap PDRB Subsektor Perkebunan Pulau Sumatera dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara keseluruhan subsektor perkebunan di pulau Sumatera tahun 2018-2022 yang menunjukkan bahwa subsektor perkebunan mengalami kenaikan setiap tahunnya terutama pada provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan provinsi dengan perkembangan PDRB subsektor perkebunan paling tinggi diantara provinsi lain. Provinsi Sumatera Utara merupakan yang kedua tertinggi perkembangan PDRB subsektor perkebunannya, kemudian disusul dengan provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Provinsi Lampung, Sumatera Barat dan Kepulauan Bangka Belitung mengalami perkembangan PDRB subsektor perkebunan yang fluktuatif. Perkembangan PDRB subsektor perkebunan paling rendah dalam suatu Provinsi adalah provinsi Kepulauan Riau. Kesepuluh Provinsi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan PDRB subsektor perkebunan di Pulau Sumatera terus mengalami kenaikan yang signifikan.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata dan positif terhadap PDRB subsektor perkebunan di Pulau Sumatera adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Serapan Tenaga Kerja. Penanaman Modal Asing berpengaruh negatif terhadap PDRB subsektor perkebunan di Pulau Sumatera sedangkan Pengeluaran Pemerintah tidak signifikan terhadap PDRB subsektor perkebunan di Pulau Sumatera.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini disarankan kepada:

1. Investasi asing lebih diarahkan ke hilirisasi hasil perkebunan misalnya pengolahan minyak sawit menjadi biodiesel atau kosmetik dibandingkan ke hulu (perkebunan itu sendiri). Perkebunan cenderung menghasilkan bahan mentah dengan margin keuntungan kecil, sementara sektor lain seperti teknologi, manufaktur, atau jasa memiliki potensi nilai tambah lebih tinggi. Kurangnya anggaran APBD pengeluaran pemerintah untuk subsektor perkebunan pada saat *covid-19* menyebabkan anggaran untuk subsektor perkebunan menjadi kecil, pengeluaran pemerintah yang tidak diarahkan dengan tepat atau tidak efisien dalam mendukung sektor perkebunan dengan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan potensinya melalui mekanisme fiskal berupa peningkatan pengeluaran sektor pertanian khususnya subsektor pekebunan
2. Bagi peneliti selanjutnya supaya menambahkan variabel-variabel lain sebagai variabel yang mempengaruhi PDRB seperti faktor potensi sumber daya, total penerimaan daerah, penerimaan pajak dan lain sebagainya
3. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajar ataupun penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abel, A.B., B.S. Bernanke & D. Croushore 2008 *Macroeconomics Sixth Edition* Pearson Education Inc, Boston.
- Agus Tri Basuki, Nano Prawoto. 2019. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Aida, N., Ciptawaty, U., Gunarto, T., & Aini, S. (2021). Analisis Dampak Penanaman Modal Asing Dan Tenaga Kerja Asing Tiongkok terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(3), 159–167. <https://doi.org/10.23960/jep.v10i3.301>
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 1
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, hal.9
- Arsyad Lincoln, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah* (edisi pertama). BPFU-UGM. Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Indonesia 2018*
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik Indonesia 2019*
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Indonesia 2020*
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Indonesia 2021*
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Indonesia 2022*
- Departemen Keuangan. 2005. *Buletin Teknis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai dengan SAP dengan Konversi*. Jakarta: Depkeu.
- Djaenuri, Haris. 2000. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah Elemen-Elemen dalam Studi Hubungan Pusat Daerah*, Makalah, Tidak dipublikasikan.
- Fajriani, Melisa, Djaimin Backe, Jumantri Yusri.(2015). *Peran Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Provinsi Riau: Analisis Struktur Output-Input*. Universitas Riau. Riau
- Gujarati, D.N. & D.C. Porter. 2009, *Basic econometric Fifth Edition*. McGraw-Hill/Irwin, New York.
- Gujarati, Damodar N, (2004). *Basic Econometrics, Fourth edition*, Singapore. McGraw-Hill Inc.
- Harefa Mandala, 2010. *Kebijakan Pembangunan Dan Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah*. Pusat Pengkajian Pengolahan data dan Informasi Sekretarian Jenderal DPR RI
- Hayati, Mimi. (2017). *Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Bireuen*. *Jurnal S. Pertanian*, 1(3), 213- 222.
- I. Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 2 Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005), 93.
- Iskandar, Arif. 2005. “Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Dan Mitos Penyerapan Tenaga Kerja”.

- Khamdana, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Indonesia, 2008-2012. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan kebijakan publik*, 23-38.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi (3rd Ed.)*. Erlangga
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga: Jakarta.
- Litvack Jennie dan Seddon Jessica (ed). 1999. *Desentralization- Briefing Noefing Notes*. Jakarta: World Bank Institute.
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Teori Makroekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 149
- Macroeconomic by Gregory Mankiw 10 (tenth edition, 2019)*.
- Mangkoesoebroto, G. (1998) *Ekonomi Publik, Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw, N. G. (2019). *Snake-Oil Economics*.
- Marini, M., Wildayana, E., & Adriani, D. (2021). ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN DARI SISI PENAWARAN AGREGAT DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 4(2), 93 - 103. <https://doi.org/https://doi.org/10.46774/pptk.v4i2.452>
- Nur Adzani, V. (2020). Analisis Pengaruh PMDN, PMA, Dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Di Indonesia Tahun 2014-2018. 2507(February), 1-9.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 147.
- Octavia, E. (2021). Perkembangan PMDN dan PMA Di Indonesia Tahun 2016-2020. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Prabowo, R., 2010. Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia. *Jurnal Mediagro*. Vol. 6 No. 2, p 62-73.
- Prasetyo.E (2011), Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing ( PMA ), Tenaga Kerja , Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa.
- Rakhmawati, A., & Boedirochminarni, A. (2018). Analisis Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 74-82.
- Rashid, I.M., N.A.A. Bakar & N.A.A. Razak, N.A.A. 2016. Determinants Of Foreign Direct Investment (FDI) In Agriculture Sector Based On Selected High-Income Developing Economies In OIC Countries: An Empirical Study On The Provinciai Panel Data By Using Stata, 2003- 2012. *Procedia economics and finance* 39 (2016) 328-334.
- Safira, E., Syechalad, M. N., Asmawati, A., & Murlida, E. (2019). Pengaruh Pmdn, Pma, Tenaga Kerja Dan Luas Lahan Sektor Pertanian Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Sektor Pertanian Di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 109-117. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10927>

- Salqaura, S. S. (2018). Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Sektor Pertanian di Pulau Jawa. *Agro Ekonomi*, 173-184.
- Saragih, J.P. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simanjuntak, Payaman J. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Penerbit FEUI. Jakarta
- Sitompul, Novita Linda.2007. Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Sumatera Utara. *Tesis*.
- Sosilawati, dkk, Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Sumatera, (Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017), h. 3.
- Sukirno, S. (2004) Pengantar Makro Ekonomi. Jakarta: Jakarta Press
- Sukirno, S. (2006). Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan dasar kebijakan. Lembaga Penerbit Penata Media Group.
- Susila. W. Goenadi. 2004. Peran Perkebunan dalam Perekonomian Indonesia, diakses dari [http://www.ipard.com/art\\_perkebun/des14-04\\_wrs-I.asp](http://www.ipard.com/art_perkebun/des14-04_wrs-I.asp) pada 12 Maret 2017.
- Susy Dan Suhendra. (2005). Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Dengan Pendekatan Input-Output. Universitas Gunadarma Jakarta Paper And Prosiding. 18582559.
- Syahroni. (2016). Analisis Peran Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Perspektif Dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 36-43
- Tambunan, T.. 2003. Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia : Beberapa Isu Penting. Ghalia Indonesia, Bogor.
- UU No.1 Tahun 1967 dan UU No. 11 Tahun 1970, Tentang Penanaman Modal Asing (PMA)
- UU No.25 Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal)
- UU No.6 Tahun 1968 dan UU No. 12 Tahun 1970, Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- Widarjono, Agus. 2009. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Ketiga. Yogyakarta: Ekonesia.
- Zaini Ibrahim, Pengantar Ekonomi Makro, (Lembaga Peneelitan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten: Banten, 2013), Cet. 1, edisi Revisi, hal. 193

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Hasil Data *Eviews Uji Chow*

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1037.178754	(9,36)	0.0000
Cross-section Chi-square	278.090720	9	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOG(SUBSEKTOR\_PERKEBUNAN)

Method: Panel Least Squares

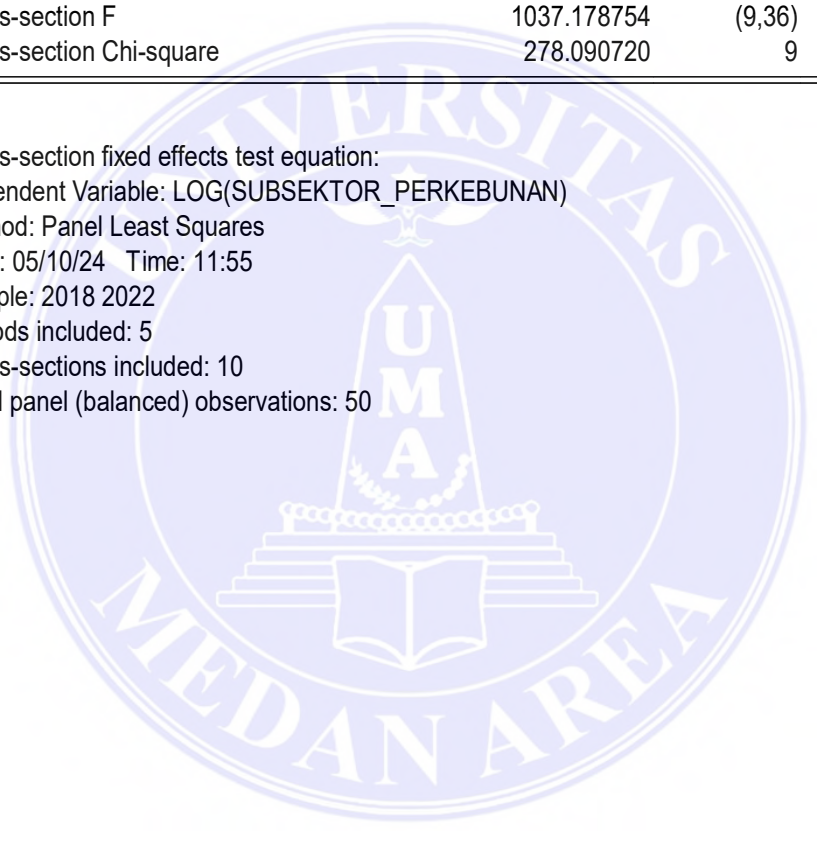
Date: 05/10/24 Time: 11:55

Sample: 2018 2022

Periods included: 5

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 50





**Lampiran 2. Hasil Data Eviews Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.242295	4	0.0365

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(PMA)	-0.010113	-0.016472	0.000008	0.0208
LOG(PMDN)	0.064783	0.050179	0.000043	0.0258
LOG(SERAPAN_TENAGA_KERJA)	0.300019	0.889167	0.064305	0.0202
LOG(PENGELUARAN_PEMERINTAH)	-0.083450	0.001134	0.001403	0.0239

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(SUBSEKTOR\_PERKEBUNAN)

Method: Panel Least Squares

Date: 05/10/24 Time: 11:58

Sample: 2018 2022

Periods included: 5

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 50

**Lampiran 3. Hasil *Eviews Fixed Effect Model***

Cross-section fixed effects test equation:  
 Dependent Variable: LOG(SUBSEKTOR\_PERKEBUNAN)  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 05/10/24 Time: 11:55  
 Sample: 2018 2022  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 10  
 Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-16.83720	3.250057	-5.180586	0.0000
LOG(PMA)	-0.317925	0.118314	-2.687130	0.0101
LOG(PMDN)	0.575917	0.199160	2.891727	0.0059
LOG(SERAPAN_TENAGA_KERJA)	1.215722	0.329925	3.684844	0.0006
LOG(PENGELUARAN_PEMERINTAH)	0.328183	0.378291	0.867541	0.3902
R-squared	0.686922	Mean dependent var		9.430991
Adjusted R-squared	0.659093	S.D. dependent var		1.359844
S.E. of regression	0.793976	Akaike info criterion		2.471112
Sum squared resid	28.36789	Schwarz criterion		2.662314
Log likelihood	-56.77780	Hannan-Quinn criter.		2.543923
F-statistic	24.68353	Durbin-Watson stat		0.276357
Prob(F-statistic)	0.000000			

**Lampiran 4. Hasil Data *Eviews Uji Chow***

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1037.178754	(9,36)	0.0000
Cross-section Chi-square	278.090720	9	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:  
 Dependent Variable: LOG(SUBSEKTOR\_PERKEBUNAN)  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 05/10/24 Time: 11:55  
 Sample: 2018 2022  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 10  
 Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-16.83720	3.250057	-5.180586	0.0000
LOG(PMA)	-0.317925	0.118314	-2.687130	0.0101
LOG(PMDN)	0.575917	0.199160	2.891727	0.0059
LOG(SERAPAN_TENAGA_KERJA)	1.215722	0.329925	3.684844	0.0006
LOG(PENGELUARAN_PEMERINTAH)	0.328183	0.378291	0.867541	0.3902
R-squared	0.686922	Mean dependent var		9.430991
Adjusted R-squared	0.659093	S.D. dependent var		1.359844
S.E. of regression	0.793976	Akaike info criterion		2.471112
Sum squared resid	28.36789	Schwarz criterion		2.662314
Log likelihood	-56.77780	Hannan-Quinn criter.		2.543923
F-statistic	24.68353	Durbin-Watson stat		0.276357
Prob(F-statistic)	0.000000			

**Lampiran 5. Data Eviews Uji Hausman dan Fixed Effect Model**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.242295	4	0.0365

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(PMA)	-0.010113	-0.016472	0.000008	0.0208
LOG(PMDN)	0.064783	0.050179	0.000043	0.0258
LOG(SERAPAN_TENAGA_KERJA)	0.300019	0.889167	0.064305	0.0202
LOG(PENGELUARAN_PEMERINTAH)	-0.083450	0.001134	0.001403	0.0239

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(SUBSEKTOR\_PERKEBUNAN)

Method: Panel Least Squares

Date: 05/10/24 Time: 11:58

Sample: 2018 2022

Periods included: 5

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.825429	5.901055	0.987184	0.3301
LOG(PMA)	-0.010113	0.017730	-0.570362	0.5720
LOG(PMDN)	0.064783	0.020020	3.235893	0.0026
LOG(SERAPAN_TENAGA_KERJA)	0.300019	0.362844	0.826854	0.4138
LOG(PENGELUARAN_PEMERINTAH)	-0.083450	0.111789	-0.746496	0.4602

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.998797	Mean dependent var	9.430991
Adjusted R-squared	0.998363	S.D. dependent var	1.359844
S.E. of regression	0.055021	Akaike info criterion	-2.730702
Sum squared resid	0.108984	Schwarz criterion	-2.195336
Log likelihood	82.26756	Hannan-Quinn criter.	-2.526832
F-statistic	2299.583	Durbin-Watson stat	1.194867
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 6. Tabel sektor pertanian tahun 2018-2022 per provinsi

No	Provinsi	Tahun	Sub. Pangan	Sub. Horti	Sub Perkebunan	Sub. Perikanan	Sub hutan dan Penebangan Kayu	Sub Perikanan
1	Aceh	2018	6 823,13	4 691,54	10 049,92	5 019,87	1 783,18	5 718,61
		2019	6 562,56	4 948,47	10 615,30	5 370,47	1 678,31	6 069,35
		2020	6 636,13	5 195,68	11 172,02	5 385,00	1 667,01	6 417,93
		2021	5 980,81	5 477,67	11 737,26	5 475,20	1 382,88	6 243,59
		2022	5 572,87	5 954,65	11 998,14	5 752,04	1 412,75	6 809,89
2	Sumatera Utara	2018	18 557,97	12 124,74	70 259,22	10 301,19	4 215,53	10 841,89
		2019	19 319,50	12 080,06	75 505,18	10 948,49	4 322,40	10 608,83
		2020	19 269,31	12 266,55	78 282,66	10 733,60	4 406,60	10 418,29
		2021	18 933,24	12 840,30	83 634,98	11 119,75	4 293,74	9 800,05
		2022	19 064,96	13 285,67	89 944,43	11 379,89	4 254,75	9 974,51
3	Sumatera Barat	2018	10 011,38	5 222,25	10 736,56	2 349,65	2 049,62	5 497,02
		2019	10 009,60	5 500,70	10 961,16	2 516,57	2 065,27	5 708,76
		2020	10 018,88	5 735,85	10 901,57	2 571,98	2 065,15	5 894,58
		2021	9 316,79	6 138,23	11 855,27	2 749,52	1 784,90	6 160,87
		2022	9 409,36	6 444,45	12 033,28	2 962,74	1 799,50	6 692,87
4	Riau	2018	4 079,51	2 567,58	83 571,97	3 328,37	18 029,67	11 935,50
		2019	3 974,04	2 658,49	88 076,57	3 469,32	18 470,72	11 948,92
		2020	4 179,15	2 786,63	91 600,81	3 405,58	19 960,09	12 054,32
		2021	3 877,50	2 851,04	96 569,76	3 579,23	20 506,39	12 171,81
		2022	3 747,35	2 901,53	100 030,70	3 804,79	20 618,50	12 407,13

No	Provinsi	Tahun	Sub. Pangan	Sub. Horti	Sub Perkebunan	Sub. Perternakan	Sub hutan dan Penebangan Kayu	Sub Perikanan
5	Jambi	2018	2 950,83	4 087,83	24 549,67	1 657,13	1 690,30	2 769,84
		2019	2 731,41	4 268,28	25 431,83	1 738,99	1 760,29	2 883,49
		2020	2 810,66	4 220,90	25 989,82	1 692,98	1 873,78	2 813,06
		2021	2 465,71	4 319,66	27 644,77	1 716,26	1 716,26	2 991,05
		2022	2 277,07	4 582,95	29 387,06	1 861,87	1 861,87	3 064,30
6	Sumatera Selatan	2018	8 728,09	3 059,53	19 671,03	4 633,50	5 146,68	8 472,63
		2019	8 673,16	3 303,70	20 006,80	5 049,97	5 216,25	5 249,97
		2020	8 672,69	3 483,38	20 437,06	5 048,02	5 612,68	5 048,02
		2021	8 823,53	3 723,28	21 026,19	5 262,19	5 613,87	5 262,19
		2022	8 936,28	3 831,62	22 690,63	5 367,12	5 730,89	5 367,12
7	Bengkulu	2018	3 595,77	1 547,70	2 036,92	1 746,71	253,5	2 858,64
		2019	3 669,76	1 595,67	2 111,63	1 824,58	252,24	3 010,21
		2020	3 632,23	1 606,60	2 149,33	1 858,86	247,74	3 016,91
		2021	3 611,09	1 645,45	2 274,17	1 904,68	242,51	3 141,25
		2022	10 180,87	1 724,62	2 395,45	2 015,37	239,02	3 279,44
8	Lampung	2018	22 273,99	3 963,60	15 422,83	9 686,26	782,99	13 356,17
		2019	21 728,58	3 939,35	15 853,21	10 414,10	756,02	13 676,51
		2020	22 722,68	3 408,16	15 856,15	10 357,19	499,79	13 949,76
		2021	22 287,79	3 473,23	15 395,32	10 975,42	265,88	14 059,82
		2022	22 852,78	3 590,72	16 007,36	11 861,54	147,46	13 324,90
9.	Kp. Bangka Belitung	2018	260,1	931,43	4 444,30	540,54	167,16	3 132,12

No	Provinsi	Tahun	Sub. Pangan	Sub. Horti	Sub Perkebunan	Sub. Perternakan	Sub hutan dan Penebangan Kayu	Sub Perikanan
9	Kep. Bangka Belitung	2019	282,69	935,75	4.494,27	551,26	172,16	3.312,29
		2020	340,15	1.053,73	4.816,15	537,61	172,88	3.627,78
		2021	314,64	1.015,02	4.768,15	583,85	148,9	3.810,54
		2022	308,82	1.020,09	4.993,67	613,73	137,12	3.673,63
10	Kep. Riau	2018	16,6	213,37	1.133,57	636,02	21,25	3.693,03
		2019	14,89	251,56	1.211,38	715,37	16,96	3.466,03
		2020	12,65	239,75	1.137,83	719,28	17,3	3.281,00
		2021	9,39	254,42	1.067,88	807,23	18,92	3.128,85
		2022	9,41	248,52	1.063,84	848,2	17,36	3.288,00

## Lampiran 7. Tabel variabel-variabel PDRB

No	Provinsi	Tahun	Sub. Perkebunan	PMA	PMDN	Serapan T.K	Pengeluaran Pemerintah
1	Aceh	2018	10.049,92	71,2	970	2.240.378	12.306.306
2	Aceh	2019	10.615,30	137,5	3.606,90	2.362.705	14.672.122
3	Aceh	2020	11.172,02	51,1	8.241,10	2.411.352	13.242.213
4	Aceh	2021	11.737,26	203,3	7.904,70	2.388.367	13.683.582
5	Aceh	2022	11.998,14	127,6	4.424,20	2.556.789	14.571.755
6	Sumatera Utara	2018	70.259,22	1.227,60	8.371,80	7.122.114	12.563.388
7	Sumatera Utara	2019	75.505,18	379,5	19.749,00	7.267.029	13.440.324
8	Sumatera Utara	2020	78.282,66	974,8	18.189,50	7.295.545	14.080.971
9	Sumatera Utara	2021	83.634,98	580,4	18.484,50	7.029.733	13.749.499
10	Sumatera Utara	2022	89.944,43	1.316,10	22.789,20	7.243.566	11.521.145
11	Sumatera Barat	2018	10.736,56	180,8	2.309,40	2.663.327	6.267.376
12	Sumatera Barat	2019	10.961,16	157,1	3.026,60	2.623.039	6.551.279
13	Sumatera Barat	2020	10.901,57	125,6	3.106,20	2.747.820	7.271.607
14	Sumatera Barat	2021	11.855,27	66,9	4.183,70	2.584.119	6.468.907
15	Sumatera Barat	2022	12.033,28	95,6	2.559,80	2.610.772	6.971.605
16	Riau	2018	83.571,97	1.032,90	9.056,40	3.085.817	8.469.509
17	Riau	2019	88.076,57	1.034,00	26.292,20	3.079.405	8.690.391
18	Riau	2020	91.600,81	1.078,00	34.117,80	3.106.731	8.486.303
19	Riau	2021	96.569,76	1.921,40	24.997,80	3.124.739	8.931.704
20	Riau	2022	100.030,70	2.748,70	43.062,00	3.456.998	8.900.867
21	Jambi	2018	24.549,67	101,9	2.876,50	1.784.287	4.198.256



No	Provinsi	Tahun	Sub. Perkebunan	PMA	PMDN	Serapan T.K	Pengeluaran Pemerintah
22	Jambi	2019	25.431,83	54,6	4.437,40	1.721.542	4.824.366
23	Jambi	2020	25.989,82	27,1	3.511,70	1.729.439	4.430.393
24	Jambi	2021	27.644,77	50,9	6.204,20	1.735.146	4.388.300
25	Jambi	2022	29.387,06	39,2	8.882,70	1.774.671	4.534.503
26	Sumatera Selatan	2018	19.671,03	1.078,60	9.519,80	4.242.127	7.941.144
27	Sumatera Selatan	2019	20.006,80	736,5	16.921,10	4.214.766	9.654.702
28	Sumatera Selatan	2020	20.437,06	1.543,90	15.824,50	4.207.656	9.517.763
29	Sumatera Selatan	2021	21.026,19	1.259,70	16.266,90	4.215.064	10.060.730
30	Sumatera Selatan	2022	22.690,63	1.226,30	23.526,00	4.240.660	9.094.806
31	Bengkulu	2018	2.036,92	136,6	4.902,80	1.031.744	2.979.578
32	Bengkulu	2019	2.111,63	144,8	5.458,10	1.036.317	3.118.304
33	Bengkulu	2020	2.149,33	192,3	5.399,20	1.067.126	2.698.458
34	Bengkulu	2021	2.274,17	23,7	4.923,50	1.043.415	2.880.225
35	Bengkulu	2022	2.395,45	52,2	6.957,30	1.065.221	2.818.305
36	Lampung	2018	15.422,83	132,3	12.314,70	4.412.972	7.538.989
37	Lampung	2019	15.853,21	155,2	2.428,90	4.245.420	7.058.252
38	Lampung	2020	15.856,15	498,4	7.120,50	4.359.237	6.967.358
39	Lampung	2021	15.395,32	173,8	10.513,20	4.409.752	7.097.652
40	Lampung	2022	16.007,36	247,8	5.809,20	4.668.900	4.881.196
41	Kep.Bangka Belitung	2018	4.444,30	46,3	3.112,90	723.494	2.364.346
42	Kep.Bangka Belitung	2019	4.494,27	88,7	2.915,20	703.460	2.776.076

No	Provinsi	Tahun	Sub. Perkebunan	PMA	PMDN	Serapan T.K	Pengeluaran Pemerintah
43	Kep.Bangka Belitung	2020	4.816,15	48,4	1.863,80	733.858	2.575.170
44	Kep.Bangka Belitung	2021	4.768,15	44,7	3.677,40	718.693	2.465.813
45	Kep.Bangka Belitung	2022	4.993,67	129,7	6.309,00	741.550	2.275.731
46	Kep. Riau	2018	1.133,57	831,3	4.386,00	1.035.236	3.421.886
47	Kep. Riau	2019	1.211,38	1.363,40	5.656,40	1.024.868	3.655.145
48	Kep. Riau	2020	1.137,83	1.649,40	14.249,00	1.062.004	3.855.203
49	Kep. Riau	2021	1.067,88	1.043,70	9.768,70	1.037.133	3.703.816
50	Kep. Riau	2022	1.063,84	934	4.817,40	1.068.891	3.632.206

## Lampiran 8. Surat Pengantar Riset



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS PERTANIAN

Kampus I : Jalan Kotam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7360012 Medan 20371  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 1313/FP.1/01.7/V/2024

Medan, 16 Mei 2024

Lamp. : -

Hal : Pengambilan Data/Riset

Kepada yth.  
Kepala Laboratorium Statistik dan Komputasi Data  
Fakultas Pertanian Universitas Medan Area  
di\_ \_\_\_\_\_  
Tempat

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian studi dan penyusunan skripsi di Fakultas Pertanian Universitas Medan Area, maka bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami atas nama:

Nama : Widya Anisarahmadani  
NIM : 208220020  
Program Studi : Agribisnis

Untuk melaksanakan Penelitian dan atau Pengambilan Data di Laboratorium Statistik dan Komputasi Data Fakultas Pertanian untuk kepentingan skripsi berjudul "**Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap PDRB Subsektor Perkebunan di Pulau Sumatera**".

Penelitian dan atau Pengambilan Data Riset ini dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan dan kebutuhan akademik.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Anwa Panjang Hermosa, SP, M.Si

Tembusan:

1. Ka. Prodi Agribisnis
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



## Lampiran 9. Surat Selesai Riset



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS PERTANIAN

Kampus I : Jalan Kelam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360165, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20371  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Seraya Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20132  
Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

### SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN SKRIPSI Nomor : 1667/FP.2/06.A/VI/2024

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Medan Area dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Widya Anisarahmadani  
NPM : 20 822 0020  
Prodi : Agribisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap PDRB Subsektor Perkebunan di Pulau Sumatera

Waktu Pelaksanaan : 20 Mei s/d 30 Mei 2024  
Tempat : Laboratorium Statistik dan Komputasi Data Fakultas Pertanian  
Universitas Medan Area

Dosen Pembimbing : I. Siti Sabrina Salqaura, SP, M.Sc

Adalah benar telah selesai melaksanakan penelitian dengan mengambil data sekunder yang bersumber dari "Badan Pusat Statistik (BPS)" di Laboratorium Statistik dan Komputasi Data Fakultas Pertanian Universitas Medan Area.

Demikian Surat Keterangan ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Medan, 05 Juli 2024

Danjang Hernosa, SP, M.Si

